**KEBIJAKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN:**

**ANALISIS PERBANDINGAN IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN DI SAUDI ARABIA DAN INDONESIA**

**Ika Kurnia Sofiani**

*ikur.wafie@gmail.com*

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

 **Ahmad Madany**

*ahmadmadanybengkalis@gmail.com*

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

 **Muhammad Iqbal**

*im8828622@gmail.com*

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

*Korespondensi penulis:* *ikur.wafie@gmail.com*

***Abstract*** *This study examines the policy of educational decentralization through a comparative analysis of the implementation of instructional strategies in Saudi Arabia and Indonesia. The study aims to evaluate the extent to which this policy contributes to the effectiveness of instructional strategies and to identify its strengths and challenges in both countries. The findings reveal that decentralization allows educational institutions to innovate and adopt more contextual and participatory teaching approaches. However, issues such as disparities in resources, institutional capacity, and policy consistency across regions pose significant challenges. The study recommends strengthening local capacities, enhancing coordination among stakeholders, and integrating national and local policies to promote equity and improve the quality of education under a decentralized system.*

***Keywords: Educational Decentralization, Instructional Strategies, Comparative Analysis***

***Abstrak*** *Penelitian ini mengkaji kebijakan desentralisasi pendidikan melalui analisis perbandingan implementasi strategi pembelajaran di Saudi Arabia dan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini berkontribusi terhadap efektivitas strategi pembelajaran serta mengidentifikasi kelebihan dan tantangan yang dihadapi di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi memberikan ruang inovasi bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan partisipatif. Namun, terdapat kendala terkait kesenjangan sumber daya, kapasitas kelembagaan, dan konsistensi kebijakan antarwilayah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas lokal, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta integrasi kebijakan nasional dan lokal untuk mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di bawah sistem desentralisasi.*

***Kata Kunci: Desentralisasi Pendidikan, Strategi Pembelajaran, Analisis Perbandingan***

**PENDAHULUAN**

Kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan langkah strategis dalam memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk mengelola sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Desentralisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, pemerataan, dan relevansi pendidikan dengan kondisi sosial, budaya, serta ekonomi masyarakat setempat. Dalam konteks global, banyak negara telah mengadopsi model desentralisasi sebagai upaya untuk mengatasi berbagai tantangan dalam sistem pendidikan yang terlalu sentralistik. Kebijakan ini memungkinkan institusi pendidikan untuk lebih fleksibel dalam mengembangkan kurikulum, strategi pembelajaran, dan pengelolaan sumber daya secara mandiri.

Indonesia dan Saudi Arabia merupakan dua negara dengan latar belakang sosial, budaya, dan sistem pemerintahan yang berbeda, namun keduanya menerapkan kebijakan desentralisasi pendidikan dengan pendekatan yang khas. Di Indonesia, desentralisasi pendidikan secara resmi dimulai sejak reformasi tahun 1999 yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Kebijakan ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan, termasuk dalam hal perekrutan guru, pengembangan kurikulum muatan lokal, dan pengalokasian anggaran pendidikan. Di sisi lain, Saudi Arabia mulai menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi secara lebih terbatas dengan mengarahkan tanggung jawab tertentu kepada otoritas pendidikan lokal dan regional, meskipun sebagian besar kendali masih berada di tingkat pusat.

Implementasi strategi pembelajaran dalam kerangka desentralisasi di kedua negara menunjukkan dinamika yang beragam. Di Indonesia, kebebasan sekolah untuk mengembangkan metode pembelajaran telah mendorong inovasi di berbagai daerah, terutama dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan pendekatan pembelajaran modern. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal kesenjangan sumber daya, kualitas guru, dan manajemen sekolah di berbagai wilayah. Sementara itu, di Saudi Arabia, strategi pembelajaran lebih terstandarisasi dan terstruktur, namun terdapat upaya untuk mendorong adaptasi lokal, terutama dalam penggunaan teknologi pendidikan dan penguatan kapasitas guru di tingkat daerah. Meskipun pendekatannya berbeda, kedua negara menghadapi tantangan yang serupa dalam menjaga kualitas pendidikan di tengah keragaman kondisi lokal.

Melalui analisis perbandingan ini, penelitian bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan desentralisasi memengaruhi penerapan strategi pembelajaran di Indonesia dan Saudi Arabia serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat saling dipelajari. Penelitian ini penting untuk memahami efektivitas kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran di berbagai konteks sosial dan geografis. Dengan menelaah perbedaan dan persamaan implementasi strategi pembelajaran di dua negara tersebut, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam mengoptimalkan peran desentralisasi dalam sistem pendidikan.

**METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi perbandingan (comparative study) yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan implementasi strategi pembelajaran dalam kerangka kebijakan desentralisasi pendidikan di Saudi Arabia dan Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap kebijakan pendidikan nasional dan regional, laporan resmi kementerian pendidikan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan para pemangku kepentingan pendidikan, seperti guru, kepala sekolah, dan pejabat dinas pendidikan di kedua negara, guna memperoleh pemahaman tentang praktik pembelajaran di lapangan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan dalam pelaksanaan strategi pembelajaran yang dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi di masing-masing negara.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Strategi Pembelajaran di Indonesia dan Saudi Arabia**

Peran pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan strategi pembelajaran di Indonesia dan Saudi Arabia mencerminkan karakter sistem pendidikan yang masing-masing negara anut. Di Indonesia, desentralisasi pendidikan yang dimulai sejak era reformasi memberikan wewenang yang cukup besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pembelajaran. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tetap menetapkan kebijakan umum dan standar nasional pendidikan, namun implementasi teknisnya banyak bergantung pada inisiatif pemerintah daerah.

Sebaliknya, di Saudi Arabia, sistem pendidikan masih bersifat relatif sentralistik, meskipun telah terdapat upaya reformasi untuk memberi lebih banyak kewenangan kepada otoritas pendidikan lokal dan regional. Peningkatan kualitas pengajaran melalui program pelatihan guru dan reformasi kurikulum di Arab Saudi telah menjadi fokus utama dalam upaya modernisasi sistem pendidikan negara tersebut.[[1]](#footnote-1) Kementerian Pendidikan Saudi Arabia tetap menjadi lembaga utama dalam merancang kurikulum, strategi pembelajaran, serta evaluasi mutu pendidikan. Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai mendorong keterlibatan daerah melalui inisiatif seperti Vision 2030, yang antara lain menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan berbasis lokal.

Di Indonesia, otonomi daerah dalam pendidikan memberi peluang bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Contohnya, beberapa daerah menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis kearifan lokal, teknologi digital, dan integrasi nilai-nilai budaya dalam pembelajaran. Hal ini memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan menjadikan pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan mereka. Namun, pelaksanaan strategi pembelajaran yang efektif tetap membutuhkan sinergi antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di daerah.

Masalah yang muncul dari desentralisasi pendidikan di Indonesia salah satunya adalah ketimpangan antarwilayah. Daerah yang memiliki sumber daya lebih besar, baik dari sisi anggaran maupun tenaga pendidik, cenderung lebih siap dalam menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Sebaliknya, daerah tertinggal menghadapi kendala dalam penyediaan guru berkualitas, infrastruktur pendukung, dan akses terhadap pelatihan. Dalam konteks ini, pemerintah pusat masih memegang peranan penting dalam memberikan dukungan teknis dan sumber daya, serta menetapkan indikator kinerja yang seragam untuk menjamin kualitas pendidikan secara nasional.

Sementara itu, di Saudi Arabia, meskipun sebagian besar kebijakan pendidikan masih ditentukan oleh pemerintah pusat, peran otoritas lokal mulai diperkuat melalui kebijakan pelatihan guru berbasis wilayah, digitalisasi sistem pembelajaran, dan peningkatan fasilitas pendidikan daerah. Salah satu strategi yang dikembangkan adalah memberi ruang kepada kepala sekolah dan pengawas pendidikan daerah untuk menyesuaikan implementasi kurikulum dengan karakteristik peserta didik setempat. Namun, ruang inovasi ini tetap berada dalam batas kebijakan yang ditetapkan oleh pusat, sehingga tidak sebebas di Indonesia.

Negara ini berbentuk kerajaan dengan sistem pemerintah menganut monarki Absolut.[[2]](#footnote-2) Penguatan peran daerah dalam konteks pendidikan di Saudi Arabia terlihat dari upaya peningkatan koordinasi antara otoritas pendidikan pusat dan regional. Pemerintah pusat menyediakan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan, sementara pihak daerah diberi tanggung jawab untuk memastikan bahwa strategi pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Meskipun proses ini masih dalam tahap pengembangan, arah kebijakan menunjukkan komitmen pemerintah Saudi untuk memperbaiki mutu pendidikan melalui pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis wilayah.

Jika dibandingkan, Indonesia berada dalam posisi yang lebih progresif dalam hal otonomi daerah, namun menghadapi tantangan besar dalam menjaga konsistensi mutu pendidikan di seluruh wilayah. Di sisi lain, Saudi Arabia relatif lebih terkendali dalam menjaga standarisasi, namun mulai membuka ruang fleksibilitas pelaksanaan strategi pembelajaran di tingkat lokal. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan kondisi sosial-politik masing-masing negara serta tingkat kesiapan kelembagaan pendidikan yang dimiliki.

Pemerintah pusat di kedua negara tetap memegang peran kunci dalam menjaga arah dan kualitas sistem pendidikan. Di Indonesia, peran ini diwujudkan melalui penyusunan standar nasional, alokasi dana pendidikan, dan penyediaan program pelatihan guru. Di Saudi Arabia, meskipun pusat mengatur lebih banyak aspek teknis, peran pengawasan dan evaluasi mulai didelegasikan ke tingkat wilayah, yang menjadi awal dari pergeseran tanggung jawab yang lebih luas ke daerah. Namun, pada prinsipnya kita tidak dapat menutup mata dari kendala empiris yang muncul dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.[[3]](#footnote-3)

Pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi hal yang tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan strategi pembelajaran. Tanpa koordinasi yang baik, desentralisasi justru berisiko menciptakan disparitas pendidikan. Oleh karena itu, kedua negara perlu memperkuat mekanisme komunikasi antarlembaga, memperjelas pembagian peran, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan agar strategi pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan merata.

1. **Pengaruh Desentralisasi terhadap Inovasi Strategi Pembelajaran di Sekolah-sekolah Indonesia dan Saudi Arabia**

Pengaruh desentralisasi terhadap inovasi strategi pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia dan Saudi Arabia menjadi aspek penting dalam dinamika reformasi pendidikan kedua negara. Desentralisasi membuka ruang bagi satuan pendidikan dan otoritas lokal untuk lebih mandiri dalam merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kebijakan desentralisasi pendidikan memiliki tujuan utama untuk memberikankewenangan kepada pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pendidikan yangsesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. [[4]](#footnote-4)Di Indonesia, kebijakan desentralisasi yang diterapkan sejak awal tahun 2000-an telah memberikan otonomi cukup besar kepada pemerintah daerah dan sekolah untuk mengelola kurikulum, metode pembelajaran, serta pengembangan kapasitas guru. Hal ini memberikan peluang bagi terciptanya inovasi yang disesuaikan dengan konteks lokal.

Sekolah-sekolah di Indonesia memanfaatkan otonomi tersebut untuk menciptakan strategi pembelajaran yang lebih kontekstual dan partisipatif. Misalnya, beberapa sekolah di daerah pedesaan mengembangkan model pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan kearifan lokal seperti budaya bertani, kerajinan, atau pelestarian lingkungan. Di kota-kota besar, inovasi sering kali terfokus pada pemanfaatan teknologi digital seperti pembelajaran berbasis platform daring, simulasi interaktif, hingga penggunaan kecerdasan buatan dalam proses evaluasi. Ragam inovasi ini menunjukkan bahwa desentralisasi mampu mendorong sekolah menjadi lebih kreatif dan responsif terhadap perubahan.

Namun, tidak semua daerah di Indonesia memiliki kapasitas yang sama untuk berinovasi. Kesenjangan dalam hal infrastruktur pendidikan, akses terhadap teknologi, serta kualitas sumber daya manusia membuat inovasi pembelajaran hanya berkembang pesat di wilayah yang relatif maju. Sekolah-sekolah di daerah tertinggal kerap menghadapi tantangan dalam mengakses pelatihan guru yang memadai, keterbatasan bahan ajar, hingga minimnya dukungan teknis. Dalam konteks ini, desentralisasi belum sepenuhnya memberikan dampak yang merata terhadap kualitas pembelajaran, meskipun telah membuka ruang inovasi.

Di sisi lain, Saudi Arabia yang sebelumnya memiliki sistem pendidikan yang sangat terpusat mulai melakukan reformasi yang memberi peluang kepada sekolah-sekolah untuk melakukan penyesuaian strategi pembelajaran. Melalui program transformasi nasional dan Vision 2030, pemerintah Saudi mulai memperkenalkan kebijakan yang mendorong fleksibilitas di tingkat lokal, termasuk pemberian kewenangan terbatas kepada sekolah dalam memilih metode pembelajaran dan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Meski ruang geraknya masih terbatas dibanding Indonesia, perubahan ini sudah mulai menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kreativitas dalam proses belajar mengajar.

Inovasi strategi pembelajaran di sekolah-sekolah Saudi Arabia lebih banyak berfokus pada integrasi teknologi dan penguatan soft skills. Pemerintah pusat menyediakan infrastruktur digital yang mendukung pembelajaran daring dan hybrid, serta membangun sistem manajemen pembelajaran nasional. Sekolah-sekolah mulai menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, serta pendekatan yang menekankan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Untuk menerapkan desentralisasi pendidikan, setiap daerah harus memiliki pemahaman tentang sejarah, kondisi, potensi, masalah, dan asprasi daerah tersebut.[[5]](#footnote-5) Meskipun inovasi ini masih berada dalam batasan kerangka nasional yang ketat, penerapannya menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya perubahan strategi pembelajaran yang lebih relevan dengan tuntutan abad ke-21.

Salah satu faktor pendorong inovasi di Saudi Arabia adalah investasi besar-besaran dalam pelatihan guru dan digitalisasi pendidikan. Pemerintah secara aktif memberikan pelatihan berbasis teknologi kepada pendidik, serta mendorong keterlibatan industri dalam mendukung pembelajaran vokasional dan keterampilan kerja. Hal ini mempercepat adopsi strategi pembelajaran inovatif, meskipun tetap dalam pengawasan pemerintah pusat. Dibandingkan dengan Indonesia, inovasi di Saudi Arabia cenderung lebih terstandar, tetapi memiliki keunggulan dalam hal konsistensi implementasi di seluruh wilayah karena dukungan yang kuat dari pusat.

Desentralisasi juga berpengaruh terhadap motivasi dan keterlibatan guru dalam mengembangkan metode pengajaran. Di Indonesia, banyak guru yang terdorong untuk menciptakan media ajar sendiri, memanfaatkan sumber daya lokal, dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang lebih aktif. Sedangkan di Saudi Arabia, guru mulai dilibatkan dalam pengembangan kurikulum mikro dan penilaian formatif berbasis teknologi. Kedua pendekatan ini memperlihatkan bahwa desentralisasi mampu meningkatkan partisipasi guru dalam inovasi strategi pembelajaran, asalkan diiringi dengan dukungan yang memadai. Oleh sebab itu, perbaikan dalam mutu pendidikan perlu dilakukan secara berkelanjutan.[[6]](#footnote-6)

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa desentralisasi tidak serta merta menjamin terjadinya inovasi. Tanpa sistem evaluasi yang baik, pelatihan yang berkelanjutan, dan alokasi sumber daya yang adil, banyak sekolah akan kesulitan berinovasi secara efektif. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Saudi Arabia perlu memastikan bahwa desentralisasi pendidikan diimbangi dengan kebijakan pendukung yang mampu memperkuat kapasitas sekolah dan pendidik untuk berinovasi secara berkelanjutan.

1. **Tantangan dan Solusi Implementasi Strategi Pembelajaran dalam Sistem Desentralisasi di Indonesia dan Saudi Arabia**

Sistem desentralisasi pendidikan yang diterapkan di Indonesia dan Saudi Arabia membawa berbagai dampak terhadap implementasi strategi pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Kebijakan ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah atau lembaga pendidikan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran. Dalam praktiknya, desentralisasi menawarkan fleksibilitas dan peluang adaptasi lokal, namun juga membuka ruang munculnya tantangan struktural dan teknis yang memengaruhi efektivitas pembelajaran. Baik Indonesia maupun Saudi Arabia mengalami dinamika yang berbeda dalam merespons tantangan tersebut, seiring dengan karakteristik kebijakan, kondisi geografis, dan kesiapan sumber daya masing-masing negara.

Pada hakikatnya “desentralisasi “adalahpenyerahan kewewenangan pemerintahanPemerintah Pusat kepada pemerintah daerahotonom untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia (UU Nomor 32/ 2004, Pasal 1angka 7 Desentralisasi). [[7]](#footnote-7)Di Indonesia, desentralisasi pendidikan memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran dengan kebutuhan lokal. Akan tetapi, kebijakan ini juga menciptakan disparitas antardaerah dalam hal kualitas pembelajaran. Sementara di Saudi Arabia, reformasi desentralisasi berjalan dalam koridor yang lebih terkontrol oleh pusat, di mana pengambilan kebijakan tetap bersifat top-down namun memberi ruang inovasi terbatas di tingkat lokal.

Tantangan:

1. Kesenjangan Kapasitas Sumber Daya Manusia:

Di Indonesia, banyak guru di daerah terpencil belum memiliki kompetensi yang memadai dalam merancang strategi pembelajaran yang kontekstual dan inovatif. Di Saudi Arabia, meskipun pelatihan guru dilakukan secara nasional, ada kesenjangan penerapan di wilayah dengan infrastruktur pendidikan yang kurang berkembang.

1. Terbatasnya Fasilitas dan Teknologi:

Implementasi strategi pembelajaran modern kerap terkendala pada ketersediaan sarana pendukung. Sekolah di daerah terpencil Indonesia kerap kekurangan akses internet atau perangkat pembelajaran digital begitu juga dengan Saudi Arabia.

1. Koordinasi antara Pusat dan Daerah:

Ketidakseimbangan antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di daerah sering menyebabkan kebingungan dalam implementasi pembelajaran.

Solusi:

1. Peningkatan Kapasitas Guru secara Merata:

Pemerintah perlu menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan berbasis kebutuhan lokal, baik secara daring maupun luring.

1. Penguatan Infrastruktur Teknologi Pendidikan:

Investasi yang merata dalam penyediaan perangkat digital, jaringan internet, dan platform pembelajaran harus menjadi prioritas. Di Saudi Arabia, pemerintah dapat memperluas jangkauan digitalisasi hingga ke daerah rural, sedangkan Indonesia dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk menjangkau wilayah tertinggal. Oleh karena itu, penyelenggaraan desentralisasi pendidikan diharapkan akan munculsekolah-sekolah yang efktif mengacu pada prinsip manajemen berbasi sekolah (MBS).[[8]](#footnote-8)

1. Penyelarasan Regulasi dan Komunikasi Kebijakan:

Diperlukan saluran komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diterjemahkan dengan benar di tingkat sekolah.

Solusi-solusi ini penting agar sistem desentralisasi tidak hanya menjadi pengalihan kewenangan administratif, tetapi benar-benar memperkuat kualitas pendidikan secara menyeluruh. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajaran abad ke-21, strategi pengajaran harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik yang semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, desentralisasi harus diiringi oleh regulasi yang dinamis serta pendampingan yang intensif agar tidak menjadi beban baru bagi sekolah, tetapi justru mendorong lahirnya strategi pembelajaran yang adaptif dan kontekstual.

Di Indonesia, beberapa daerah mulai menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan strategi pembelajaran berbasis komunitas yang relevan dengan kehidupan lokal. Pendekatan seperti ini penting untuk diperluas agar desentralisasi tidak hanya menguntungkan daerah tertentu. Sementara itu, di Saudi Arabia, integrasi strategi pembelajaran dengan program-program nasional seperti Vision 2030 memberi arah yang jelas, tetapi perlu fleksibilitas yang lebih besar bagi sekolah untuk menciptakan inovasi yang sesuai dengan karakter siswa dan wilayahnya. Pendidikan tinggi di Arab Saudi terbagi menjadi dua kategori utama yakni pendidikan agama dan pendidikan umum.[[9]](#footnote-9)

Pengalaman kedua negara menunjukkan bahwa tantangan implementasi strategi pembelajaran dalam sistem desentralisasi dapat diatasi melalui komitmen bersama antara pusat dan daerah, penguatan kapasitas lokal, serta investasi jangka panjang dalam infrastruktur pendidikan. Meskipun pendekatan keduanya berbeda, baik Indonesia maupun Saudi Arabia dapat saling belajar mengenai bagaimana mendesain kebijakan pendidikan yang adaptif, akomodatif, dan inklusif. Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai sistem pengelolaan pembangunan pendidikan yang menekan keberagaman. Dan dengan demikian, strategi pembelajaran dalam kerangka desentralisasi tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi pendidikan yang lebih luas.[[10]](#footnote-10)

**KESIMPULAN**

Kedua negara ini menunjukkan pendekatan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelibatan otoritas lokal. Indonesia menerapkan desentralisasi dengan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dan sekolah dalam mengelola aspek-aspek pendidikan, seperti pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran yang kontekstual. Sementara itu, Saudi Arabia masih mempertahankan kontrol pusat yang kuat, namun telah mulai membuka ruang bagi otoritas lokal untuk berperan dalam pengelolaan pendidikan secara terbatas, khususnya dalam hal teknis pelaksanaan pembelajaran dan peningkatan kapasitas guru.

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh kesiapan struktur kelembagaan, sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan yang konsisten di masing-masing negara. Di Indonesia, desentralisasi membuka peluang besar bagi inovasi pembelajaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, namun tantangan besar masih ada dalam bentuk ketimpangan sumber daya dan kualitas antar daerah. Di Saudi Arabia, meskipun proses desentralisasi berjalan lebih lambat, penerapan strategi pembelajaran yang lebih terarah dan dukungan infrastruktur yang kuat memberikan kestabilan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Kebijakan desentralisasi pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas strategi pembelajaran apabila didukung oleh koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, serta pelatihan yang berkelanjutan bagi tenaga pendidik. Pembelajaran dari pengalaman kedua negara menunjukkan bahwa desentralisasi bukan hanya soal pelimpahan kewenangan, tetapi juga menuntut komitmen, kolaborasi, dan adaptasi kebijakan yang berkelanjutan agar dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan nasional dan lokal, serta perhatian terhadap konteks sosial-budaya masing-masing wilayah, menjadi kunci utama dalam implementasi strategi pembelajaran yang efektif dalam sistem pendidikan yang terdesentralisasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Subijanto. “Prinsip-Prinsip dan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 16, no. 5 (September 10, 2010): 532–49. https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i5.484.

Husnul Khotimah, Mislaini Mislaini, and Delita Marni. “Perkembangan Sistem Pendidikan di Saudia Arabia.” *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (December 10, 2024): 01–15. https://doi.org/10.59024/atmosfer.v3i1.1157.

Maulidin, Ahmad, and Komarudin Sassi. “KEBIJAKAN ANGGARAN PENDIDIKAN ARAB SAUDI DALAM UPAYA MENINGKATKAN HUMAN DEVELOPMENT INDEX,” n.d.

Sofiani, Nancy, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, and Yulia Septi Wahyuni. “Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan di Indonesia.” *Menara Ilmu* 18, no. 1 (April 19, 2024). https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5273.

Tengku Darmansah, Irma Tussa’diyah Hasibuan, Khansa Arista Widya Maulida, and Zuchairunnisa Zuchairunnisa. “Peluang dan Tantangan Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan.” *PUSTAKA: Jurnal Bahasa dan Pendidikan* 5, no. 1 (December 16, 2024): 178–85. https://doi.org/10.56910/pustaka.v5i1.1824.

Warsito, Adi, and Serli Wulandari. “Konsep Pemerintahan Arab Saudi dan Kebijakan Visi 2030.” *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam* 2, no. 3 (January 1, 1970): 231–41. https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i3.14024.

Wicaksono, Kristian. “Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia.” *Jurnal Bina Praja*, March 2012, 21–28. https://doi.org/10.21787/JBP.04.2012.21-28.

Witta Perdana Putri, Mislaini Mislaini, and Ulfa Aulia. “Analisis Pendidikan di Arab Saudi dan Keunikannya Dibandingkan Pendidikan di Indonesia.” *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (December 18, 2024): 45–55. https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i1.2098.

1. Ahmad Maulidin and Komarudin Sassi, “Kebijakan Anggaran Pendidikan Arab Saudi Dalam Upaya Meningkatkan Human Development Index,” n.d., hlm 131. [↑](#footnote-ref-1)
2. Adi Warsito and Serli Wulandari, “Konsep Pemerintahan Arab Saudi dan Kebijakan Visi 2030,” *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam* 2, no. 3 (January 1, 1970): hlm 239, https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i3.14024. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kristian Wicaksono, “Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia,” *Jurnal Bina Praja*, March 2012, hlm 25-26, https://doi.org/10.21787/JBP.04.2012.21-28. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nancy Sofiani et al., “Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan di Indonesia,” *Menara Ilmu* 18, no. 1 (April 19, 2024): hlm 119, https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5273. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tengku Darmansah et al., “Peluang dan Tantangan Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan,” *PUSTAKA: Jurnal Bahasa dan Pendidikan* 5, no. 1 (December 16, 2024): hlm 181, https://doi.org/10.56910/pustaka.v5i1.1824. [↑](#footnote-ref-5)
6. Husnul Khotimah, Mislaini Mislaini, and Delita Marni, “Perkembangan Sistem Pendidikan di Saudia Arabia,” *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (December 10, 2024): hlm 1, https://doi.org/10.59024/atmosfer.v3i1.1157. [↑](#footnote-ref-6)
7. Subijanto --, “Prinsip-Prinsip dan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 16, no. 5 (September 10, 2010): hlm 534, https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i5.484. [↑](#footnote-ref-7)
8. --, hlm 536. [↑](#footnote-ref-8)
9. Witta Perdana Putri, Mislaini Mislaini, and Ulfa Aulia, “Analisis Pendidikan di Arab Saudi dan Keunikannya Dibandingkan Pendidikan di Indonesia,” *Ihsanika: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (December 18, 2024): hlm 53, https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i1.2098. [↑](#footnote-ref-9)
10. Tengku Darmansah et al., “Peluang dan Tantangan Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan,” hlm 180. [↑](#footnote-ref-10)